

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prasarana dan Sarana di UPPKB Tamanmartani sudah mendukung tugas dan fungsi UPPKB tetapi masih perlu penambahan dan perbaikan.
2. Pada pelaksanaan SOP penindakan di UPPKB Tamanmartani sudah dilakukan secara baik, namun terkadang dalam hal menindak pelanggaran masih kurang tegas dan di beri toleransi.
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) belum sepenuhnya baik, karena tidak adanya kotak P3K, Alat Pemadam Kebakaran dan susunan instalasi listrik yang kurang rapi.
4. Alat Pelindung Diri (APD) jarang dikenakan oleh petugas saat melakukan operasional di UPPKB. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kesadaran para petugas terhadap resiko bahaya apabila tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

5.2 Saran

1. Untuk sarana dan prasarana segera dilengkapi atau diperbaiki sarana dan prasarana yang kurang agar dapat menjalankan kinerja secara optimal
2. Dilakukan penyesuaian SOP menurut aturan yang sudah diatur guna terciptanya alur kerja yang teratur dan sesuai.
3. Perancangan SMK3 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja agar segera diterapkan di UPPKB Tamanmartani, juga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya SMK3 bagi keselamatan dan kesehatan petugas saat bekerja. Dan juga perlu dibuatkan atau dipasang rambu-rambu, poster, marka atau semacamnya tentang SMK3.
4. Alat Pelindung Diri (APD) perlu dilengkapi bagi semua petugas UPPKB Tamanmartani hal ini harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran petugas dalam mencegah resiko kecelakaan pada saat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

(2012), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

(2015), Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Jakarta.

(2017), SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Jakarta.

(2012), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan. Jawa Tengah

(2010) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Jakarta

(1996). Per.05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta